



Tapem Razia Kotak Sumbangan

YOGYAKARTA (SINDO) - Pungutan liar (pungli) di instansi-instansi kelurahan dengan modus kotak sumbangan segera ditertibkan. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) dalam waktu dekat akan menggelar razia untuk mengamankan kotak-kotak tersebut.

Kapala Bagian (Kabag) Tapem, Purwanto mengatakan, keberadaan kotak-kotak sumbangan yang tersedia di kelurahan tidak dibenarkan. Selain tidak ada pengaturannya baik dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwal), pertanggungjawaban atas uang hasil sumbangan masyarakat juga tidak ada. Pemkot sendiri, kata dia, tidak pernah ada intruksi untuk menyediakan kotak-kotak tersebut. "Saya memaklumi kalau kotak sumbangannya itu untuk pembangunan masjid atau Bazis (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah). Tapi harus ada tulisan dalam kotak tersebut," katanya kepada wartawan, kemarin.

Rencana penertiban ini ditempuh Pemkot, menyusul adanya tuduhan dari Dewan bahwa pungli dengan modus kotak sumbangan masih saja terjadi di instansi-instansi kelurahan. Dalam prakteknya, penarikan sumbangan oleh pihak kelurahan ini memang tidak memaksa. Biasanya, warga usai mengurus keperluan administratif hanya disarankan mengisi kotak sumbangan seiklasnya. Selain melarang adanya kotak-kotak sumbangan di kelurahan, kata dia, Pemkot juga tidak membenarkan adanya penarikan biaya administratif di luar ketentuan. Jika ditemukan ada indikasi melakukan tindakan tersebut, Pemkot akan bersikap tegas.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Yogyakarta, Ardianto menuturkan, penyediaan kotak sumbangan di kelurahan bukan hal baru. Hal itu sudah sering dikritisi tapi tidak ada tindak lanjut yang konkrit. Dia berharap, ke depan modus pungli dengan cara ini sudah tidak ada lagi. "Untuk menghindarinya, Pemkot harus memberi perhatian tambahan terhadap aparat kelurahan," pintanya.

(arif budianto)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005